

Nomor : B/ 580 /RB.06/2024

1 Februari 2024

Hal : Hasil Evaluasi Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
Tahun 2023

Yth. **Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai**
di

Tuapejat

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2020 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, Tim Penilai Nasional (TPN) telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Keputusan Menteri PANRB Nomor 739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada reformasi birokrasi berdampak dan kolaboratif.

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dalam rangka mencapai sasaran Terciptanya tata Kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif serta terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas RB di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, kesimpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

Indeks RB Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2023 adalah 54,38 dengan kategori "CC". Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Penilaian	Bobot	Nilai
A	RB General	100	47,84
B	RB Tematik	20	6,54
C	Indeks RB	120	54,38
			CC

Hasil evaluasi tahun 2023 "tidak diperbandingkan" dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri PANRB nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 dan peraturan turunannya, terdapat perubahan kerangka logis, komponen, indikator, bobot dan kriteria penilaian yang signifikan. Secara lengkap rincian hasil evaluasi RB, baik nilai, catatan, dan rekomendasi pada setiap indikator dapat diakses melalui <https://portalrb.menpan.go.id>.

Demikian laporan hasil evaluasi atas kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Selanjutnya kami harapkan agar upaya-upaya pelaksanaan reformasi birokrasi ini dapat ditingkatkan secara berkelanjutan dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,

Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan



Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Gubernur Sumatera Barat;
3. Bupati Kepulauan Mentawai.

Hasil Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai - LKE KEMENPANRB

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi	Tim Penilai
1	RB General	Strategi Pelaksanaan RB General	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	1.42	1.42	1. Rencana Aksi belum sepenuhnya relevan untuk mencapai target Sasaran Kegiatan Utama; 2. Belum terdapat keabsahan atas Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah; 3. Indikator Output atas Rencana Aksi sudah relevan, namun belum cukup menggambarkan Sasaran yang ingin diwujudkan.	1. Terdapat Sasaran Kegiatan Utama yang belum dikawal dengan Rencana Aksi secara relevan; 2. Belum terdapat keabsahan atas Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah; 3. Masih terdapat Indikator Output atas Rencana Aksi yang belum cukup menggambarkan Sasaran.	Tim Penilai Nasional
2	RB General	Strategi Pelaksanaan RB General	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	7	1.38	0.05			Tim Penilai Nasional
3	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	2	100	2	Sangat Baik dengan Capaian 100%	Agar segera ditetapkan Perkada tentang SOTK pasca penyederhanaan struktur organisasi agar dapat ditindaklanjuti ke tahap penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja.	Kementerian Dalam Negeri
4	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	2	2	0.8	segera ditetapkan menjadi peraturan	segera ditetapkan menjadi peraturan	Kementerian PANRB - Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana
5	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian	4	2.915	2.33	1. Sasaran tidak berorientasi hasil 2. Indikator tidak spesifik	1. Menyusun kebijakan teknis manajemen kinerja sebagai acuan perencanaan kinerja di tingkat Pemda maupun OPD. 2. Menginstruksikan	Badan Pengawasan Keuangan dan

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi	Tim Penilai
		RB	Intern Pemerintah				dan relevan 3. Target tidak memperhatikan capaian tahun lalu 4. Target tidak memperhatikan capaian tahun lalu 5. Pengendalian yang ada belum efektif 6. Penerapan MR belum didukung sumber daya yang memadai 7. Risiko kecurangan belum dikelola	Bappeda untuk memperbaiki perencanaan kinerja dengan memperhatikan PermenPANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah 3. Menginstruksikan Bappeda untuk mengintensifkan pembinaan terkait perencanaan kinerja yang baik pada seluruh OPD. 4. Menginstruksikan APIP untuk melaksanakan pengawasan atas perencanaan kinerja di tingkat Pemda maupun OPD. 5. melaksanakan evaluasi atas efektivitas pengendalian yang telah diimplementasikan serta mendokumentasikan hasil evaluasi secara tertib sebagai bahan peningkatan kualitas pengendalian yang berkelanjutan. 6. Mengalokasikan sumberdaya (utamanya anggaran) yang memadai untuk pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM terkait pengelolaan risiko pemerintah daerah. 7. Menetapkan struktur pengelola risiko dan menjadikan pengelolaan risiko sebagai indikator kinerja UPR. 8. Berkoordinasi dengan BPKP untuk pembinaan pengelolaan risiko pemerintah daerah.	Pembangunan
6	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	3.5		0	Kurang	Agar membangun unit kerja berintegritas dan melayani pada Instansi Pemerintah	Kementerian PAN RB c.q. Deputi RB Kunwas
7	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	4	65.21	2.61	Perencanaan: Penjenjangan/ cascading kinerja belum menjabarkan kinerja secara keseluruhan sampai ke level operasional. Pengukuran: Aplikasi manajemen kinerja belum dimanfaatkan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja. Saat ini pemantauan kinerja masih dilakukan	Perencanaan: Melakukan reviu dan perbaikan penjenjangan/cascading kinerja dari level jabatan tertinggi hingga ke level operasional dengan memerhatikan logical framework dan CSF dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Selanjutnya, memanfaatkan hasil penjenjangan/ cascading kinerja tersebut sebagai dasar untuk menyempurnakan perencanaan kinerja secara keseluruhan. Pengukuran: Memanfaatkan aplikasi manajemen kinerja sebagai alat untuk monitoring pencapaian kinerja Bupati dan setiap PD sekaligus dapat diintegrasikan dengan sistem manajemen kinerja lainnya. Pelaporan: Menyempurnakan penyusunan laporan kinerja pada pemerintah daerah dan PD mengacu pada PermenPAN-RB No.	Kementerian PAN RB c.q. Deputi RB Kunwas

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi	Tim Penilai
							<p>secara manual. Pelaporan: Laporan kinerja belum sepenuhnya memuat informasi terkait pencapaian kinerja, perbandingan realisasi dengan target tahun sebelumnya dan target jangka menengah, analisis peningkatan/ penurunan kinerja, analisis program/ kegiatan yang mendukung keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja serta analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja. Evaluasi Internal: Laporan hasil evaluasi internal belum sepenuhnya memberikan rekomendasi yang cukup dan mendalam untuk memperbaiki kualitas implementasi SAKIP pada setiap PD</p>	<p>53 Tahun 2014 yang memuat informasi terkait pencapaian kinerja, perbandingan realisasi dengan target tahun sebelumnya dan target jangka menengah, analisis peningkatan/ penurunan kinerja, analisis program/ kegiatan yang mendukung keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja serta analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja. Evaluasi Internal: Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja agar lebih menggambarkan tingkat akuntabilitas unit yang dievaluasi, serta memastikan rekomendasi hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan.</p>	
8	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2.5		0	Belum menyusun Arsitektur SPBE dalam SIA	Perlu menyusun Arsitektur SPBE as-is dalam SIA	'Kementerian PANRB - Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi	Tim Penilai
9	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Digitalisasi Arsip	2.5	22.41	0.56	Penjelasan terkait hasil tingkat digitalisasi arsip dapat dikonfirmasi ke Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	-	Berbasis Elektronik" Arsip Nasional Republik Indonesia
10	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	2.5	1	0.5	Belum Menyampaikan Renaksi, Waktu tindak lanjut masih lama, Kualitas tidak sesuai substansi	Perlu Menyusun Renaksi dan Melaksanakan Sosialisasi	Kementerian PANRB - Asisten Deputi Transformasi Digital Pelayanan Publik
11	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Kualitas Kebijakan	2.5		0	Nilai nol dan membutuhkan perhatian.		Lembaga Administrasi Negara
12	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Reformasi Hukum	2.5	57.43	1.44	Pelaksanaan Reformasi Hukum cukup.	Pelaksanaan Reformasi Hukum perlu menjadi baik dan ditingkatkan.	Kementerian Hukum dan HAM
13	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2.5	1.29	0.65	- Penyelenggaraan statistik sektoral di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai masih berada pada predikat Kurang. - Penerapan Aspek Perencanaan Data terkait pendefinisian kebutuhan statistik dan desain statistik sudah dilakukan oleh seluruh Produsen Data, namun masih berdasarkan pedoman	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu menyusun suatu kebijakan/kaidah baku tentang penerapan Aspek Perencanaan Data terkait pendefinisian kebutuhan statistik dan desain statistik berupa prosedur baku baik secara formal, informal, manual, maupun sistem digital yang berlaku bagi seluruh Produsen Data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.	Badan Pusat Statistik

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi	Tim Penilai
							yang hanya berlaku untuk kegiatan statistik masing-masing. Sedangkan penerapan Aspek Perencanaan Data terkait penyiapan instrumen belum dilakukan oleh seluruh Produsen Data.		
14	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2.5	72.38	1.81	Baik	Selamat atas prestasi yang diraih. Tingkatkan pencapaian khususnya untuk keterisian Formasi Jabfung Pengelola PBJ.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
15	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Sistem Merit	4	129	1.26		1) Melanjutkan penyusunan SKJ untuk seluruh jabatan hingga ke tahap penetapan; 2) Melanjutkan asesmen kompetensi agar lebih banyak pegawai yang terpetakan profil kompetensinya; 3) Memulai pemetaan pegawai ke dalam talent pool dan rencana suksesi sesuai dengan ketentuan nasional; 4) Menyusun rencana kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai baik metode klasikal maupun nonklasikal berdasarkan hasil analisis kesenjangan kompetensi dan kinerja pegawai; 5) Melaksanakan promosi ke Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dengan berdasarkan pada pertimbangan kompetensi (hasil asesmen atau uji kompetensi) dan penilaian kinerja; 6) Mengidentifikasi pegawai dengan kinerja bermasalah dalam pemantauan kinerja, melakukan pembinaan bagi pegawai dengan kinerja bermasalah, serta membangun dan menerapkan mekanisme monitoring untuk memastikan dilaksanakannya tindak lanjut terhadap hasil pembinaan kinerja tersebut.	Komisi Aparatur Sipil Negara
16	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan	Indeks Pelayanan Publik	1.5	2.3	0.69			*Kementerian PANRB - Asisten Deputi

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi	Tim Penilai
		RB							Perumusan Sistem dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik
17	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1.5	67.03	1.01			Ombudsman Republik Indonesia
18	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	9	1.53	2.75		Rekomendasi dapat dilihat pada Laporan Hasil Evaluasi yang dapat diakses melalui aplikasi tauval.spbe.go.id	"Kementerian PANRB - Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik"
19	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Capaian Indikator Kinerja Utama Makro	2	100	2			Tim Penilai Nasional
20	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Capaian Indikator Kinerja Non Makro	8	42.5	2.22			Tim Penilai Nasional
21	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Opini BPK	5	5	5			Badan Pemeriksa Keuangan
22	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Tindak Lanjut Rekomendasi	4	79.4	3.18			Badan Pemeriksa Keuangan
23	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Indeks BerAkhlaq	4	57.3	2.29	Cukup Sehat		Kementerian PAN RB c.q. Deputi SDMA
24	RB General	Capaian Sasaran	Survei Penilaian Integritas	10	68.18	6.82	rentan	"Rekomendasi 1 : Perbaikan mendasar dan menyeluruh terhadap upaya pencegahan korupsi	Komisi Pemberantasan

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi	Tim Penilai
		Strategis						<p>yang sudah dilakukan dengan memastikan hal-hal berikut: (1) Memasukkan larangan dan sanksi terkait pelaksanaan tugas dalam kode etik di instansi dan/atau regulasi internal lainnya. (2) Internalisasi melalui pelatihan dan komunikasi rutin dengan pegawai/pimpinan di instansi untuk menciptakan perilaku baru dalam melaksanakan tugas. (3) Menyusun kebijakan, regulasi, dan mekanisme penanganan benturan kepentingan di instansi. (4) Menyusun program/kegiatan bagi calon pimpinan/pejabat di instansi untuk meningkatkan integritas dan deklarasi konflik kepentingan yang dimiliki sebelum menjabat. (5) Membangun mekanisme pengawasan internal untuk mendeteksi intervensi dan benturan kepentingan sebelum, saat, dan setelah pimpinan menduduki jabatan.; Rekomendasi 2 : Mempertahankan, menginovasikan, dan memonitor secara berkala upaya yang telah dilakukan, hingga tidak ada lagi pegawai yang menerima suap/gratifikasi dari pengguna layanan di instansi.; Rekomendasi 3 : Perbaiki mendasar dan menyeluruh terhadap pengawasan internal agar lebih proaktif, seperti audit berkala untuk mendeteksi penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas, mark up anggaran, penyalahgunaan pengadaan barang dan jasa, hingga penyalahgunaan honor kegiatan.; Rekomendasi 4 : Perbaiki mendasar dan menyeluruh terhadap upaya pencegahan korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa yang sudah dilakukan dan memastikan hal-hal berikut: (1) Menyusun proses dan alur dari perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Memperkuat peran dan independensi unit kerja pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Membangun mekanisme probity audit berkala untuk mendeteksi adanya masalah dalam proses pengadaan barang dan jasa. (4) Memastikan dan</p>	Korupsi

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi	Tim Penilai
								<p>memperkuat vendor management system. (5) Penegakan pengelolaan benturan kepentingan dalam proses pengadaan. (6) Implementasi proses pengadaan dan pembayaran secara elektronik yang sudah disiapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.; Rekomendasi 5 : Perbaiki mendasar dan menyeluruh dalam proses promosi dan mutasi pegawai, dengan memastikan adanya penyusunan dan penegakan aturan mengenal sistem merit dan pengelolaan benturan kepentingan dalam pengelolaan SDM di seluruh tingkat jabatan di instansi.; Rekomendasi 6 : Perbaiki mendasar dan menyeluruh terhadap upaya pencegahan korupsi yang sudah dilakukan dengan memastikan hal-hal berikut: (1) Memasukkan larangan dan sanksi terkait pelaksanaan tugas dalam kode etik di instansi dan/atau regulasi internal lainnya. (2) Internalisasi melalui pelatihan dan komunikasi rutin dengan pegawai/pimpinan di instansi untuk menciptakan perilaku baru dalam melaksanakan tugas. (3) Menyusun kebijakan, regulasi, dan mekanisme penanganan benturan kepentingan di instansi. (4) Menyusun program/kegiatan bagi calon pimpinan/pejabat di instansi untuk meningkatkan integritas dan deklarasi konflik kepentingan yang dimiliki sebelum menjabat. (5) Membangun mekanisme pengawasan internal untuk mendeteksi intervensi dan benturan kepentingan sebelum, saat, dan setelah pimpinan menduduki jabatan.; Rekomendasi 7 : Optimalisasikan upaya internalisasi peningkatan kesadaran dan perilaku melaporkan LHKPN melalui: (1) Sosialisasi, kampanye, dan pelatihan secara periodik dan berkelanjutan. (2) Memperkuat aturan dengan memperluas cakupan wajib lapor, sanksi dll. (3) Mengaitkan pelaporan dengan syarat untuk mendapatkan hak (promosi, insentif, dll). (4) Memberikan hukuman sosial/administratif kepada yang tidak melapor.; Rekomendasi 8 : Optimalisasi/peningkatan upaya penyediaan informasi yang</p>	

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi	Tim Penilai
								memadai dalam pelaksanaan tugas yang mencakup setidaknya lima informasi, yaitu jenis tugas/layanan, alur tugas/layanan, besaran tarif (jika ada), waktu pelaksanaan, hingga waktu penyelesaian tugas/layanan.; Rekomendasi 9 : Perbaiki mendasar terhadap upaya peningkatan prosedur layanan yang sudah dilakukan dengan memastikan berbagai hal berikut: (1) Proses bisnis yang sederhana dan tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan. (2) Optimalisasi penggunaan teknologi dalam pengambilan keputusan terkait dengan layanan yang diberikan. (3) Evaluasi dan memotret sudut pandang pengguna layanan terkait dengan prosedur dan kejelasan layanan."	
25	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Survei Kepuasan Masyarakat	8	80.59	6.45		Tetap melaksanakan SKM dan melakukan evaluasi hasil SKM secara konsisten	Kementerian PANRB - Asisten Deputi Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat
26	RB General	Koefisien	Koefisien	10	0	0			Tim Penilai Nasional
27	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Rencana Aksi)	0.4	0.17	0.17	1. Sasaran yang ditetapkan belum sepenuhnya menjawab permasalahan yang ada; 2. Terdapat indikator Sasaran yang belum memenuhi kriteria SMART dan Cukup; 3. Rencana aksi belum memuat kolaborasi dengan instansi pemerintah lainnya, khususnya kolaborasi dengan instansi pemerintah yang memiliki mandat	1. Memastikan penetapan sasaran menjawab permasalahan utama pada tema terkait; 2. Memastikan seluruh indikator memenuhi kriteria SMART dan Cukup; 3. Rencana aksi belum memuat kolaborasi dengan instansi pemerintah lainnya, khususnya kolaborasi dengan instansi pemerintah yang memiliki mandat khusus terkait pelaksanaan tema, dan atau stakeholder eksternal di luar pemerintahan.	Tim Penilai Nasional

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi	Tim Penilai
28	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Realisasi Investasi (Rencana Aksi)	0.4	0.12	0.12	<p>khusus terkait pelaksanaan tema, dan atau stakeholder eksternal di luar pemerintahan.</p> <p>1. Penetapan sasaran belum sepenuhnya menjawab permasalahan utama pada tema terkait; 2. Aspek perbaikan tata kelola belum menjadi intervensi berupa Rencana Aksi, seperti dalam hal perencanaan & penganggaran, proses bisnis & SOP, SDM, pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi; 3. Rencana aksi belum menunjukkan kolaborasi nyata dengan unsur pentahelix lain.</p>	1. Memastikan penetapan sasaran menjawab permasalahan utama pada tema terkait; 2. Memastikan intervensi berupa Rencana aksi memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & SOP, SDM, pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi; 3. Menyempurnakan Rencana aksi yang menunjukkan kolaborasi nyata dengan unsur pentahelix lain.	Tim Penilai Nasional
29	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Rencana Aksi)	0.4	0.1	0.1	<p>1. Penetapan sasaran belum sepenuhnya menjawab permasalahan utama pada tema terkait; 2. Indikator Sasaran Keberhasilan RB Tematik Instansi Pemerintah belum mampu menjawab sasaran yang ditentukan; 3. Perumusan indikator belum memenuhi</p>	1. Memastikan penetapan sasaran menjawab permasalahan utama pada tema terkait; 2. Indikator Sasaran Keberhasilan RB Tematik Instansi Pemerintah belum mampu menjawab sasaran yang ditentukan sesuai dengan tugas, fungsi, peran dan/atau mandat RB Tematiknya; 3. Memastikan seluruh Indikator memenuhi kriteria SMART dan Cukup; 4. Memastikan intervensi berupa Rencana aksi memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & SOP, SDM, pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi 5. Menyempurnakan Rencana aksi yang menunjukkan kolaborasi nyata dengan unsur pentahelix lain.	Tim Penilai Nasional

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi	Tim Penilai
							kriteria SMART dan Cukup 4. Kualitas rencana aksi belum memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & SOP, SDM, pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi 5. Rencana aksi belum memuat kolaborasi dengan instansi pemerintah lainnya, khususnya kolaborasi dengan instansi pemerintah yang memiliki mandat khusus terkait pelaksanaan tema, dan atau stakeholder eksternal di luar pemerintahan.		
30	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Rencana Aksi)	0.4					Tim Penilai Nasional
31	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Pengendalian Inflasi (Rencana Aksi)	0.4					Tim Penilai Nasional
32	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Output)	0.6	52.2	0.13			Tim Penilai Nasional
33	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Realisasi Investasi (Capaian Output)	0.6	96.39	0.17			Tim Penilai Nasional
34	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan	Digitalisasi Administrasi	0.6	60	0.09			Tim Penilai Nasional

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi	Tim Penilai
		RB Tematik	Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Output)						
35	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Output)	0.6					Tim Penilai Nasional
36	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Pengendalian Inflasi (Capaian Output)	0.6					Tim Penilai Nasional
37	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Dampak)	3	0.72	0.72			Tim Penilai Nasional
38	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak RB Tematik	Realisasi Investasi (Capaian Dampak)	3	1.65	1.65			Tim Penilai Nasional
39	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak RB Tematik	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Dampak)	3	0.56	0.56			Tim Penilai Nasional
40	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak RB Tematik	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Dampak)	3	2.83	2.83			Tim Penilai Nasional
41	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak RB Tematik	Pengendalian Inflasi (Capaian Dampak)	3					Tim Penilai Nasional